

CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I **2023**

**PENGANUGERAHAN IKPA AWARD SEMERANG
DAN REFRESHMENT REFORMULASI IKPA**

KANWIL DIJEN PERKORAHARAN DAN KEKAWILAN DAERAH PROVINSI
DIYOGYAKARTA PERIODE 2022-2023





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Gedongkuning 146 Yogyakarta 55171
Telpon (0274) 378431 Faximile (0274) 378432
Website jogja.kemenkumham.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI MANDIRI
ATAS CAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023
DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA**

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Target Kinerja merupakan rencana atau strategi yang ditetapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Pada tanggal 28 Desember 2022 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, diharapkan agar tugas pokok dan fungsi yang ada di Satuan Kerja masing- masing disesuaikan dengan yang terdapat dalam Target Kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga, juga sebagai penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana kerja Kementerian/Lembaga dalam satu tahun anggaran.

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai Zona Integritas mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, Peraturan Menteri tersebut merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebuah lembaga perlu ditetapkan sebuah target kinerja yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata.

Target kinerja yang sudah ditetapkan kemudian akan dievaluasi secara periodik baik triwulan maupun semester. Dalam pelaksanaan target yang berupa kegiatan diperlukan kinerja anggaran. Kinerja Anggaran sendiri merupakan capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja adalah untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas, dan fungsi peningkatan kualitas pada Kementerian/Lembaga. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan

tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan, penyusunan rewi angka dasar, penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya, serta pemberian penghargaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah berdasarkan rencana strategis. Didalam Rencana Strategis tersebut terdapat 8 (delapan) Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut antara lain :

- 1) Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;
- 3) Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- 5) Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- 6) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- 7) Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM;
- 8) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Berdasarkan 8 (delapan) sasaran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta menyusun Laporan Evaluasi Mandiri atas Capaian Target Kinerja Kementerian Huukum dan Ham D.I. Yogyakarta dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan Bidang Pemasyarakatan;
- 5) Penguatan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia;
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dibagi memiliki 4 divisi yang dibawah oleh kepala divisi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Divisi Administrasi

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

2) Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan,

pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi

3) Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;

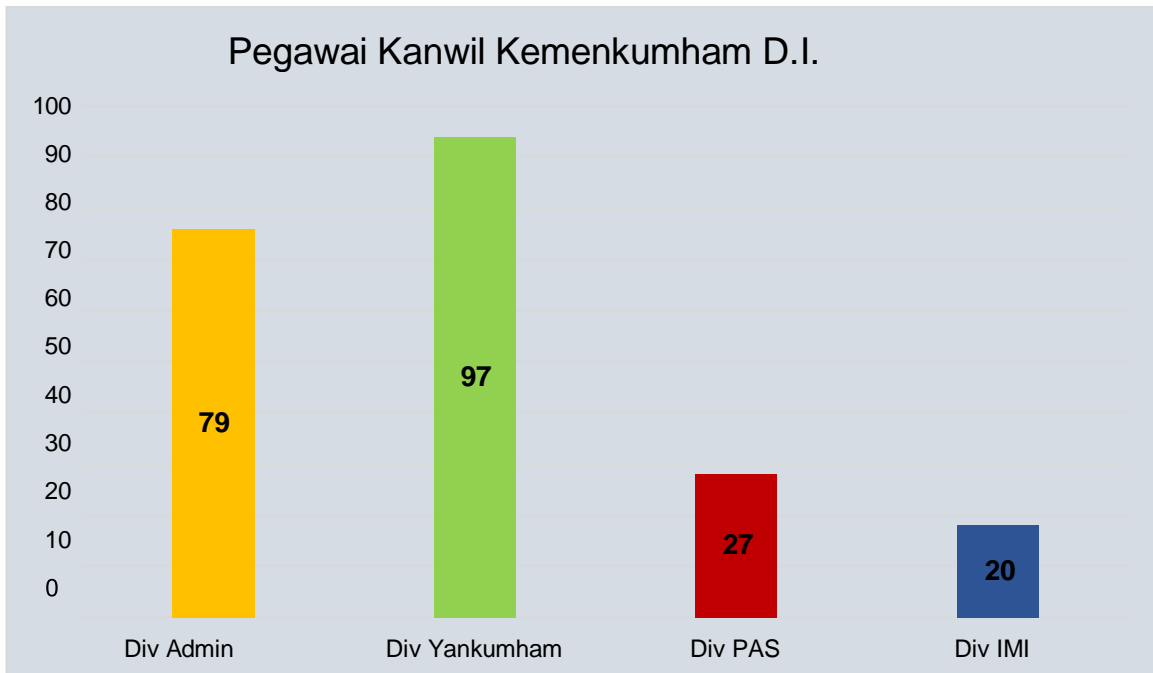
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Masyarakat;
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Masyarakat berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

4) Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian;
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Adapun jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 224 orang pegawai dengan persebaran sebagai berikut :

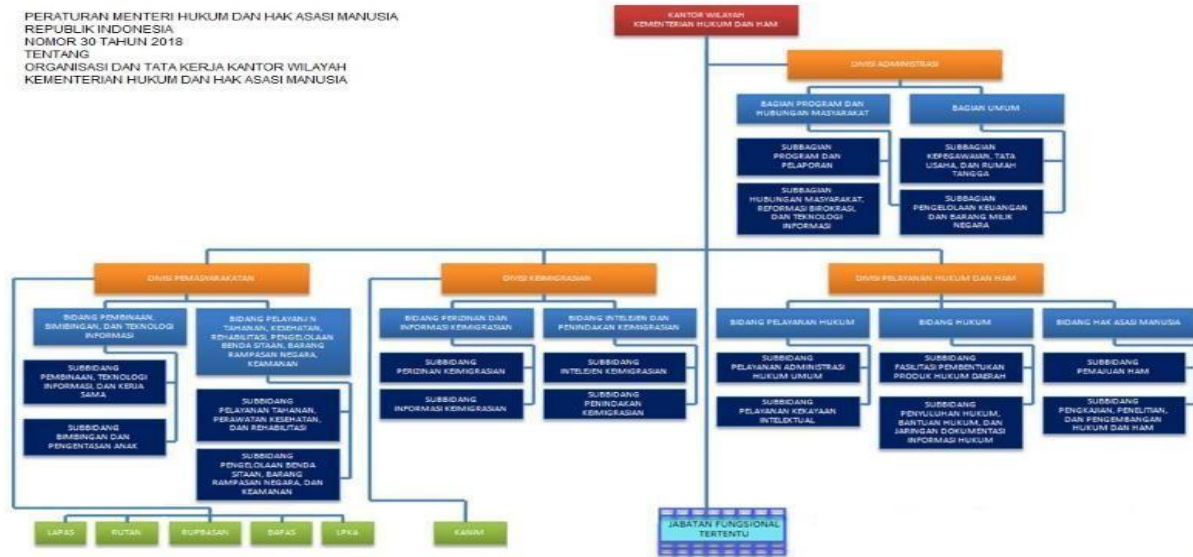


Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta memiliki 16 Unit Pelaksana Teknis yaitu :

NO.	SATUAN KERJA
1	KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA
2	LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA
3	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA
4	LAPAS KELAS IIB SLEMAN
5	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA
6	LPKA KELAS II YOGYAKARTA
7	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA
8	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA
9	RUTAN KELAS IIB WATES
10	RUTAN KELAS IIB BANTUL
11	LAPAS KELAS IIB WONOSARI
12	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA
13	RUPBASAN KELAS II WATES
14	RUPBASAN KELAS II BANTUL
15	RUPBASAN KELAS II WONOSARI
16	BAPAS KELAS II WONOSARI

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



B. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Terlaksananya Evaluasi Mandiri atas Capaian Target Kinerja Triwulan I pelaksanaan program dan Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta kurun waktu bulan Januari – Maret Tahun 2023 dan tersedianya Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham D.I. Yogyakarta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan kedepan.

b. Sasaran

- Untuk mengetahui kemajuan, realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta pada Triwulan I;
- Untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta pada Triwulan I.
- Untuk memecahkan permasalahan dan percepatan penyelesaian Capaian Target Kinerja pada Triwulan I.
- Kegiatan Pemantauan Capaian Kinerja diselenggarakan dengan maksud melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, baik kinerja kegiatan maupun anggaran.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan ini adalah Evaluasi Mandiri terhadap capaian kinerja Periode Bulan Januari, Februari, dan Maret Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta.

D. DASAR HUKUM

- a. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunagan Negara;
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.PR.01.03 tentang Target Kinerja;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L;

PELAKSANAAN TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2023

DIVISI	NOMOR	RENCANA AKSI TARGET KINERJA	B01	B02	B03
DIVISI ADMINISTRASI	1	Seluruh satuan kerja di lingkungan kantor wilayah melaksanakan SAKIP sesuai PermenPANRB NO 88 tahun 2021 tentang evaluasi AKIP dan Kepmenkumham No. M.HH-09.OT.01.01 tahun 2022	V	V	V
	2.1	Seluruh Kantor Wilayah dan Satuan Kerja telah menyelenggarakan SPIP	V	V	-
	2.2	Implementasi Manajemen Risiko (MR)	-	-	V
	3	Seluruh usulan revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui proses clearance dari Kepala Divisi Administrasi	-	-	V
	4	Meningkatnya jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tercatat pada SIMAK BMN	-	-	V
	5	Usulan Revitaliasi gedung dan bangunan kanwil yang dilengkapi dokumen kelayakan dari Dinas PUPR setempat ke Biro Perencanaan	-	-	V
	6	Aplikasi khusus Unit Utama dimanfaatkan secara efektif di wilayah	-	-	V
	7	Tersajikannya informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja melalui SIPP dan Media lainnya	-	-	V
	8	1. Meningkatnya kompetensi SDM di lingkungan Kantor Wilayah melalui implementasi Corporate University 2. Update data base pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kantor Wilayah pada system informasi Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (PK BANGKOM)	-	-	V
	9	Terlaksananya digitalisasi arsip dinamis di lingkungan Kanwil	-	-	V
10	Kanwil dan seluruh Satker melaksanakan kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan	-	-	V	
DIVISI YANKUMHAM	11	Keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	V	V	V
	12	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023	-	V	V
	13	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum melalui Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	-	-	-
	14	Tersedianya rekomendasi hasil analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan public Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	-	-	V
	15.1	Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham	V	V	V
	15.2	Penyebaran Informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan Apostille, dan Perseroan Perorangan)	V	V	V
	16	Pengisian Form CDD oleh Pengguna Jasa, Penilaian Mitigasi Risiko oleh Notaris dan Penilaian Notaris berisiko oleh LPP	V	V	V
	17	Sinkronisasi Data Notaris yang Akurat antara Database AHU, Kanwil & Pengwil	V	V	V
	18	Terkumpulnya data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	V	V	V
	19	Terlaksananya pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah	V	V	V
	20	Inventarisasi potensi pendaftaran merek di desa-desa	V	V	V
21	Kantor Wilayah menjalin kolaborasi dan sinergi dalam rangka pelaksanaan layanan KI dan peningkatan permohonan KI melalui implementasi MoU/PKS Kanwil dengan stakeholder wilayah	V	V	V	

	22	Kantor Wilayah bersama dengan Stakeholder Melaksanakan Mengusulkan inventarisasi kandidat Kawasan Karya Cipta sesuai dengan pedoman yang diberikan	-	V	V
	23	Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang mampu melakukan penelusuran dan pemanfaatan informasi paten	V	-	-
	24	Mewujudkan penegakan hukum perlindungan HKI, melalui edukasi dan membangun budaya anti barang tiruan dan bajakan (pencegahan pelanggaran KI)	-	-	V
	25	Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota melaksanakan Program Aksi HAM	V	V	V
	26	Instansi Pemerintah mendapatkan kriteria Kab/Kota Peduli HAM	V	V	V
	27	Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	V	V	V
DIVISI PAS	28	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dibidang Pelayanan Tahanan	V	V	V
	29	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dibidang Pelayanan Hukum dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan	V	V	V
	30	Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang sesuai standar	V	V	V
	31	Layanan rehabilitasi sesuai standar rehabilitasi pemasyarakatan	V	V	V
	32	Terlaksananya SPPT TI pada UPT Lapas/Rutan/Bapas	V	V	V
	33	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting	V	V	V
	34.1	Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikasi	V	V	V
	34.2	Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	V	V	V
	35	Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang bersumber dari dalam maupun dari luar dengan melakukan deteksi dini	V	V	V
	36	Terpenuhinya Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan yang valid dan lengkap	V	V	V
DIVISI IMIGRASI	37	Diimplementasikannya layanan Paspor Online terbaru pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal Pelayanan Publik)	-	-	V
	38	Terselenggaranya Klasifikasi Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)	-	-	V
	39	Terpatuhinya regulasi penjaminan orang asing oleh penjamin dan orang asing	-	-	V

C. HASIL YANG DICAPAI

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta memiliki 39 Rencana Strategis dengan 42 Rencana Aksi Target Kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

No	Divisi	Sasaran Strategis	Rencana Aksi Target Kinerja
1.	Divisi Administrasi	17	18
2.	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	4	14
3.	Divisi Pemasyarakatan	2	11
4.	Divisi Imigrasi	0	3
Jumlah		11	39

Evaluasi mandiri dilaksanakan oleh masing-masing divisi setiap triwulan yang capaian, kendala, dan strategi pencapaian target kinerja melalui matriks berikut :

TARGET KINERJA B01, B02, DAN B03 DIVISI ADMINISTRASI TAHUN 2023

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
DIVISI ADMINISTRASI								
1	Meningkatnya nilai SAKIP Kantor Wilayah	Seluruh satuan kerja di lingkungan kantor wilayah melaksanakan SAKIP sesuai PermenPANRB NO 88 tahun 2021 tentang evaluasi AKIP dan Kepmenkumham No. M.HH-09.OT.01.01 tahun 2022	Seluruh satker di lingkungan kantor wilayah Melaksanakan SAKIP secara utuh meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	<p>B01 : Menyiapkan Dokumen Perencanaan di lingkungan Kanwil</p> <p>B02-B03 : Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadiv dan Ka UPT</p>	<p>B01 : 1. Renstra Kantor Wilayah dan UPT 2. Renja/RKKL Kanwil dan UPT 3. Dokumen PK secara berjenjang dari kanwil sampai dengan UPT</p> <p>B02-B03 : Laporan e-performance [screenshot]</p>	<p>1. Renstra Kantor Wilayah dan UPT telah ditandatangani 2. Renja/RKKL Kanwil dan UPT sudah disusun dan ditandatangani 3. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah dan UPT sudah disusun dan ditandatangani; 4. capaian perjanjian kinerja sudah di input kedalam aplikasi e- performance sesuai dengan realisasi hingga triwulan I</p>	Tidak ada kendala	Monitoring Pimpinan Tinggi
2	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	1. Seluruh Kantor Wilayah dan Satuan Kerja telah menyelenggarakan SPIP	Nilai maturitas SPIP Kantor Wilayah dan satuan kerja pada level 3 (terdefinisi)	<p>B01: Koordinasi dengan APIP Kumham</p> <p>B02 Pelaksanaan Workshop (Bimtek)</p> <p>B03: 1. Pembentukan TIM Penilaian SPIP Kanwil 2. Melakukan Sosialisasi/Pendampingan penyusunan Laporan SPIP satuan kerja</p>	<p>B01: Laporan Koordinasi</p> <p>B02: Laporan pelaksanaan workshop (Bimtek)</p> <p>B03: 1. SK TIM Penilaian SPIP Kanwil dan 2. Laporan Sosialisasi /Pendampingan penyusunan Laporan SPIP satuan kerja</p>	<p>B.01 1. Telah terlaksananya koordinasi dengan APIP terkait Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 2. Telah didapatkan pemahaman yang sama terkait Penilaian Mandiri Maturitas SPIP antara APIP dan Kanwil</p> <p>B.02 1. Telah Terlaksananya Workshop Penilaian Maturitas SPIP di lingkungan kanwil</p>	<p>B.01 1. Pada bulan Januari 2023 APIP memiliki agenda kegiatan yang sangat padat, sehingga waktu pelaksanaan koordinasi menyesuaikan jadwal Tim APIP 2. Kantor Wilayah belum memiliki format PM Maturitas SPIP terbaru dari APIP yang telah disesuaikan dengan BPKP</p> <p>B.02 1. Workshop kurang optimal dikarenakan waktu pelaksanaan yang singkat 2. Terdapat operator baru dalam kegiatan workshop, sehingga terdapat kesulitan dalam proses pemahaman</p>	<p>B.01 1. Kegiatan koordinasi dilaksanakan pada saat jadwal Tim Inspektorat di Yogyakarta 2. rekomendasi untuk dilaksanakan kegiatan workshop terkait Penilaian Mandiri dengan narasumber APIP dan BPKP untuk menyamakan persepsi</p> <p>B.02 1. Kanwil Melakukan pendampingan langsung kepada UPT 2. Para peserta workshop melaksanakan in</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
						<p>Kemenkumham D.I.Y dengan narasumber Tim Inspektorat Jenderal</p> <p>2.Meningkatnya pemahaman peserta atas SPIP dan penilaian Maturitas SPIP</p> <p>B.03</p> <p>1. Terbentuknya Tim Penilaian SPIP Kantor Wilayah</p> <p>2. Terlaksanakan kegiatan Pendampingan penyusunan Laporan SPIP pada UPT</p>	<p>B.03</p> <p>1. Belum maksimalnya Kinerja Tim, dikarenakan ketentuan terkait penilaian mandiri pada UPT masih mengalami perubahan</p> <p>2. Masih ditemukan kekeliruan dalam penyusunan laporan SPIP pada UPT</p>	<p><i>house training</i> di satkernya</p> <p>B.03</p> <p>1. Satker diminta untuk melaksanakan penilaian Mandiri khusus KK Lead II pada KK.3.1, KK3.2, KK3.3 dan KK.3.4</p> <p>2. melaksanakan pendampingan secara berkala pada UPT</p> <p>3. melakukan Monitoring dan Evaluasi pada laporan yang disusun oleh UPT</p>
		2. Implementasi Manajemen Risiko (MR)	Seluruh satuan kerja melakukan Mitigasi Risiko	<p>B03: Persiapan pendampingan MR di lingkungan Kanwil:</p> <p>1. Koordinasi dengan BPKP Perwakilan</p> <p>2. Pelaksanaan Workshop Penerapan MR</p>	<p>B03: :</p> <p>1. Laporan Hasil Koordinasi dengan BPKP Perwakilan</p> <p>2. Laporan hasil Pelaksanaan Workshop Penerapan MR</p>	<p>B.03</p> <p>1. Telah terlaksananya kegiatan koordinasi dengan BPKP Perwakilan D.I.Yogyakarta</p> <p>2. Telah didapatkan persepsi yang sama terkait penyusunan MR</p> <p>3. Telah terlaksananya kegiatan Workshop Penerapan MR dilingkungan Kanwil Kemenkumham DIY</p> <p>4. Seluruh peserta memperoleh pemahaman terkait Manajemen Risiko, dan proses mitigasi</p>	<p>B.03</p> <p>1. terdapat kesulitan menyusun dokumen manajemen risiko, dikarenakan mitigasi risiko seharusnya melibatkan langsung UPR pada masing-masing satker</p>	<p>B.03</p> <p>1. dilaksanakan konsultasi dengan APIP terkait kendala yang dihadapi</p> <p>2. melaksanakan kegiatan pendampingan pada satker</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
						<p>khususnya pada layanan publik terkait risiko integritas, pungli dan korupsi</p>		
3	Seluruh revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja harus mendapat clearance dari Kepala Kantor Wilayah melalui divisi administrasi	Seluruh usulan revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui proses clearance dari Kepala Divisi Administrasi	Setiap usulan revisi anggaran belanja modal dari satuan kerja ke unit utama wajib melalui kantor wilayah	<p>B03</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat SE Kepala Kanwil kepada seluruh UPT Apabila melakukan usulan revisi anggaran belanja modal harus melalui persetujuan Kantor Wilayah Satuan kerja melakukan analisis usulan revisi belanja modal sebelum diusulkan ke kanwil 	<p>B03</p> <ol style="list-style-type: none"> SE Kepala Kanwil kepada seluruh UPT Apabila melakukan usulan anggaran harus melalui persetujuan Kantor Wilayah Laporan Analisis usulan revisi belanja modal Satuan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> Sudah diterbitkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Nomor W14-554.KU.01.01 Tahun 2023 tentang Revisi Anggaran Belanja Modal tanggal 12 Januari 2023 dan sudah didedarkan ke UPT Sudah dilakukan analisis usulan revisi belanja modal satker sesuai SE Kakanwil, utk B03 terdapat 7 (tujuh) satker yg sudah dilakukan analisis terhadap usulan revisi belanja modal yg diajukan ke Kanwil 	<ol style="list-style-type: none"> Tidak ada kendala dalam pembuatan dan pendistribusian SE Kakanwil tsb Masih ada satker yg belum memenuhi data dukung usulan revisi belanja modal sesuai yang diminta pada SE Kakanwil tersebut 	<ol style="list-style-type: none"> Menyebarkan SE Kakanwil tersebut melalui Sumaker, Whatsapp grup, disampaikan juga Ketika melaksanakan monev dengan UPT Melakukan pendampingan sebelum Satker mengirimkan usulan revisi belanja modal ke Kanwil
4	Peningkatan jumlah aset berupa Tanah dan Bangunan yang tercatat dalam SIMAK BMN dan Memiliki Sertifikat	Meningkatnya jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tercatat pada SIMAK BMN	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah aset tanah & bangunan yg tercatat dlm SIMAK BMN sebanyak 70% Bertambahnya sertifikat tanah dan bangunan yang merupakan BMN di lingkungan Kanwil sebesar 70% 	<p>B03 :</p> <p>Identifikasi, inventarisasi atas aset berupa tanah dan bangunan</p>	<p>B03 :</p> <p>Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi asset</p>	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Aset Tanah dan Gedung/ bangunan yang tercatat pada Aplikasi Sakti Aset sebanyak 80% Semua Tanah di jajaran Kanwil Kemenkumham D.I.Y Sudah bersertifikat sebesar 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 20% belum dilakukannya penginputan koreksi punguran nilai hasil temuan itjen, perubahan atas nilai Gedung dan bangunan dikarenakan renovasi, secara aplikasi karena menunggu data Audited TA 2022 selesai Tidak ada karena sudah sesuai dengan target 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan Satuan Kerja agar segera melakukan penginputan pada aplikasi SAKTI setelah data Audited TA 2022 selesai Tidak ada karena sudah sesuai dengan target
5	Inventarisasi Kebutuhan	Usulan Revitaliasi gedung dan bangunan	Setiap usulan dari kanwil terkait	B03 :	B03:	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi 	B03: Tidak ada kendala	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi intensif

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
	Revitalisasi gedung dan bangunan dilingkungan Kantor Wilayah	kanwil yang dilengkapi dokumen kelayakan dari Dinas PUPR setempat ke Biro Perencanaan	revitalisasi gedung dan bangunan telah dilengkapi data dukung sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait kelayakan gedung dan bangunan Penyusunan TOR/RAB revitalisasi gedung dan bangunan Kantor Wilayah dan Satker Pengajuan surat usulan revitalisasi gedung dan bangunan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR TOR/RAB revitalisasi gedung dan bangunan Kantor Wilayah dan Satker Surat usulan revitalisasi gedung dan bangunan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> analisis bangunan dan perhitungan estimasi biaya dari Dinas PUPESDM DIY Tersusunnya KAK dan RAB renovasi penataan gedung Kantor Wilayah Usulan revitalisasi gedung bangunan Kantor Wilayah melalui surat nomor W14.PR.01.04-319 tanggal 9 Januari 2023 hal Permohonan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kantor Wilayah D.I.Y tahun 2023. 		<ol style="list-style-type: none"> dengan Dinas PUPESDM DIY terkait rencana revitalisasi gedung bangunan Kantor Wilayah Koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan terkait kelengkapan data dukung yang harus dipenuhi untuk usulan revitalisasi gedung bangunan Kantor Wilayah.
6	Optimalisasi Pemanfaatan aplikasi khusus unit utama di Wilayah	Aplikasi khusus Unit Utama dimanfaatkan secara efektif di wilayah	Termanfaatkannya aplikasi khusus Unit Utama di lingkungan Kanwil secara optimal (100%)	B03 : Inventarisasi dan identifikasi aplikasi khusus unit utama yang dapat digunakan di satker dan kantor wilayah sesuai bidang tugas masing-masing	B03 : Laporan inventarisasi	Aplikasi telah terinventarisasi yang ada di unit wilayah, termasuk aplikasi terbaru yaitu kalandra untuk penyuluh hukum	Beberapa aplikasi masih belum menggunakan hosting milik kemenkumham	Mendaftarkan aplikasi pada SIMDATIN agar dapat menggunakan hosting milik kemenkumham
7	Penyajian informasi kinerja dan pemberitaan positif yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel	Tersajikannya informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja melalui SIPP dan Media lainnya	Glorifikasi informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja melalui SIPP dan Media lainnya setiap hari	B03 : <ol style="list-style-type: none"> Setiap Satuan kerja membuat akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM Pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari 	B03 : <ol style="list-style-type: none"> Daftar akun Satuan Kerja yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM Laporan Bulanan pelaksanaan glorifikasi informasi kinerja dan pemberitaan yang positif 	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh satuan kerja di jajaran Kanwil Kemenkumham DIY telah memiliki akun yang terintegrasi dengan SIPP Telah dilaksanakan publikasi kinerja pelayanan publik pada kanal website SIPP Telah dilaksanakan glorifikasi informasi dan publikasi kinerja positif pada kanal 	<ul style="list-style-type: none"> Baru ada satu media yang menjadi rekanan Kanwil Kemenkumham DIY untuk publikasi pemberitaan Masih ada UPT yang mengalami kendala terkait website satuan kerjanya 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun hubungan baik dengan media, misalnya melalui kegiatan coffee morning Mengirimkan rilis berita kegiatan melalui grup media di DIY Berkoordinasi dengan Pusdatin mengenai kendala yang dialami dalam website UPT

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
						media sosial maupun website satuan kerja 4. Glorifikasi informasi dan kinerja positif juga dipublikasikan di media eksternal yang ada di wilayah DIY		
8	Optimalisasi implementasi <i>Corporate University</i> dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Bidang hukum dan HAM	1. Meningkatnya kompetensi SDM dilingkungan Kantor Wilayah melalui implementasi Corporate University 2. Update data base pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kantor Wilayah pada system informasi Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (PK BANGKOM)	Meningkatnya kompetensi SDM dilingkungan Kantor Wilayah melalui implementasi Corporate University (70% dari jumlah pegawai dilingkungan Kantor wilayah)	B03: 1. Pembentukan Tim Sosialisasi pengembangan kompetensi melalui sistem informasi PK BANGKOM 2. Pelaksanaan Sosialisasi pengembangan kompetensi melalui sistem informasi PK BANGKOM 3. Sosialisasi Sistem Informasi Corpu	B03: 1. SK Tim Pelaksana Corpu 2. Laporan pelaksanaan sosialisasi	1. Telah dilaksanakan kegiatan "Sosialisasi Permenkumham Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia" oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM pada tanggal 2 Maret 2023 kepada peserta sebanyak 76(tidak hadir 6 karena cuti, dinas dan ijin). Peserta terdiri dari Pimti Kanwil, Kepala UPT dan pengampu kepegawaian serta admin PK-Bangkom; 2. Telah dibentuk Tim Pelaksana Corpu di Kantor wilayah	Belum bisa dilakukan praktek aplikasi rumah belajar.kemenkumham.go.id. sebab sedang akan diintegrasikan dengan sibangkom dari Pusdatin	Akan dilakukan integrasi rumah belajar kemenkumham.go.id dengan Sibangkom dari Pusdatin.
9	Tata Kelola digitalisasi	Terlaksananya digitalisasi arsip	Proses digitalisasi arsip dinamis di	B03 :	B03 :	• Tersedianya	• Ada beberapa Unit	• Unit Pelaksana

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
	Kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah	dinamis di lingkungan Kanwil	lingkungan Kanwil sebanyak 50%	<ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi arsip dinamis dan inaktif yang akan digitalisasi dan dihapuskan Melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Inventarisasi arsip manual yang akan digitalisasi Laporan hasil Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip 	daftar Inventarisasi Arsip Dinamis dan Inaktif yang akan didigitalisasi dan dihapuskan <ul style="list-style-type: none"> Pengelola Arsip di Unit Pelaksana Teknis sudah memahami dan mengerti tatacara arsip yang akan didigitalisasi dan dihapuskan Pengelola Arsip di Unit Pelaksana Teknis jajarannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta semakin memahami tentang pengelolaan arsip yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan 	Pelaksana Teknis yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk digitalisasi arsip <ul style="list-style-type: none"> Pengelola arsip belum mengerti arti pentingnya sebuah arsip sehingga pengelolaan arsip belum optimal 	Teknis yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai bekerjasama dengan unit pelaksana teknis yang mempunyai sarana dan prasarana <ul style="list-style-type: none"> Tim Kearsipan dari Kantor Wilayah secara berkesinambungan dan berkala terus melakukan pemantauan, pengawasan, dan monitoring ke Unit Pelaksana Teknis dan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan Narasumber dari Lembaga Kearsipan Daerah
10	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pencapaian Target Kinerja	Kanwil dan seluruh Satker melaksanakan kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan	<ol style="list-style-type: none"> Setiap triwulan kanwil melakukan evaluasi kinerja seluruh satker Kanwil memberikan piagam penghargaan kepada satker berkinerja terbaik 	B03: kanwil melakukan evaluasi capaian kinerja satker	B03 : Laporan hasil evaluasi kinerja Satuan Kerja	Laporan hasil evaluasi kinerja Satuan Kerja sudah terlaksana	Tidak ada kendala	Agar kedepannya untuk pelaksanaan kegiatan lebih diperhatikan dengan permintaan data dukung target kinerja yang sudah ditentukan

TARGET KINERJA B01, B02, DAN B03 DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2023

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM								
11	Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	Terlaksananya fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	B01: SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	B01: SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan	-	-	-
				B02-B03 : Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	B02-B03 : Laporan Kegiatan hasil koordinasi dengan melampirkan: a. dalam hal Kanwil menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi, data dukung berupa: undangan, daftar hadir, Notula, dan Dokumentasi: b. dalam hal Kanwil datang langsung ke Pemda Provinsi/Kabupaten /Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/kabupaten/ Kota, data dukun berupa: Surat tugas, notula dan dokumentasi			
12	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023	Tersusunnya Laporan Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023	B01 : -	B01 : -	Monitoring dan evaluasi administrasi pada tahun 2022 telah terlaksana sesuai dengan target.	DIPA dimohon untuk menyesuaikan target kinerja dari BPHN	
				B02: Pengecekan kesesuaian data Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai hasil Monev Administrasi Semester 1 2022 dari BPHN	B02: Surat Penyampaian Hasil Monev Administrasi Semester I 2022 dari BPHN.			
				B03:	B03:	Rapat penentuan jumlah	kurangnya komunikasi dan	Melakukan koordinasi dengan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Data Hasil Monev Administrasi Semester 1 2022 untuk dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara faktual; 2. Penyampaian jumlah Desa/Kelurahan yang akan dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara Faktual ke BPHN. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Penentuan jumlah Desa/Kelurahan yang akan dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara Faktual (UANG) 2. Surat Pemberitahuan jumlah Desa/Kelurahan yang akan dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara Faktual 	Kelurahan/Kalurahan yang akan dilakukan evaluasi faktual telah dilaksanakan dan menghasilkan output sebagaimana tercantum dalam surat penyampaian jumlah kelurahan/ Kalurahan yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara faktual.	informasi yang mendetail kepada pemerintah pembina terkait, sehingga pelaksanaan memerlukan persiapan yang lebih matang.	bagian hukum disetiap kabupaten/ kota untuk menjembatani tim dari Kanwil Kemenkumham DIY dengan pihak kelurahan/ kalurahan.
13	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum melalui Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	70% Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	B01-B03 : -	B01-B03 : -	-	-	-
14	Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks integritas Organisasi dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi hasil analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	80% rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks integritas Organisasi dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	B03: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim 2. Penyusunan Proposal 3. Presentasi Proposal 4. Evaluasi atas implementasi model intervensi Tahun 2022 	B03: <ol style="list-style-type: none"> 1. SK TIM 2. Proposal 3. Laporan Kegiatan Presentasi Proposal (bahan presentasi, undangan, absensi, notula rapat, dan dokumentasi) 4. Laporan Evaluasi atas implementasi model intervensi tahun 2022 	-	-	-
15	Memastikan pelayanan di bidang administrasi hukum umum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersosialisasikan tugas, fungsi, dan aplikasi PPNS kepada seluruh PPNS di wilayah; 2. Terintegrasinya data seluruh PPNS di Aplikasi PPNS; 3. Terlaksananya pelaporan seluruh kegiatan PPNS pada aplikasi (per triwulan / semester). 	<ol style="list-style-type: none"> B01: Koordinasi terkait sosialisasi tugas fungsi dan aplikasi PPNS di wilayah B02: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi 	<ol style="list-style-type: none"> B01: Laporan kegiatan koordinasi (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) B02: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 80% dari 	Membuat daftar inventaris masalah terkait optimalisasi pemutakhiran data.	Pengarsipan berkas data pada Kantor wilayah dan instansi terkait masih belum maksimal.	Melakukan koordinasi dengan Instansi lain terkait pengumpulan data.

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
				PPNS	keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)			
				B03: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	B03: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 90% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)			
		2. Penyebaran Informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan Apostille, dan Perseroan Perorangan)	Terlaksananya kegiatan penyebaran Informasi layanan AHU di wilayah: a. Kewarganegaraan; b. Pewarganegaraan; c. Apostille; dan d. Perseroan Perorangan untuk 10% dari jumlah UKM di wilayah masing-masing.	B01-B02: Persiapan dan koordinasi awal penyebaran informasi layanan AHU di Wilayah (Kewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan);	B01-B02: Laporan persiapan dan koordinasi awal (Lampiran: surat undangan, daftar hadir/surat tugas, notula, dokumentasi foto) dan Matriks data pengguna layanan (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan) per Januari 2022	1. Telah berkoordinasi dengan <i>stakeholder</i> (Dinas Koperasi Provinsi D.I. Yogyakarta dan Dinas Koperasi se-Kabupaten yang ada di Provinsi D.I. Yogyakarta; Kantor Pelayanan Pajak Provinsi D.I. Yogyakarta dan Dinas Koperasi se-Kabupaten yang ada di Provinsi D.I. Yogyakarta) dalam rangka menyepakati kerja sama diseminasi PT Perorangan yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2023. 2. Di bidang Apostille,	- Penyediaan data dukung untuk diseminasi PT Perorangan yang ditargetkan 10% dari jumlah UKM, untuk Provinsi Yogyakarta sejumlah kurang lebih 34,000 - Belum tersosialisasinya cara input data pemohon pewarganegaraan untuk anak berkewarganegaraan ganda Pasal 3A PP No. 21/2022	- Diseminasi PT Perorangan bekerja sama dengan media sosial yang dimiliki stakeholder - Berkoordinasi dengan perwakilan Dit. Tata Negara, Ditjen. AHU
				B03 : Penyebaran Informasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan	B03 : Laporan pelaksanaan penyebaran informasi layanan Kewarganegaraan dan pewarganegaraan (Lampiran:			

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
					surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi dan materi/bahan paparan)	membantu masyarakat yang mengajukan permohonan Apostille. Sejauh ini permohonan Layanan Apostille dari D.I. Yogyakarta diterima dengan baik oleh verifikator di Ditjen. AHU. 3. Di bidang Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan, melalui loket Layanan AHU pegawai pada Subbid AHU senantiasa menjawab dengan baik berbagai pertanyaan yang diajukan masyarakat yang akan mengurus pewarganegaraan (bagi anak berkewarganegaraan ganda maupun naturalisasi) dan bagi WNI yang akan melepaskan kewarganegaraannya , termasuk proses pengurusannya sampai selesai. Saat ini Layanan AHU sedang memproses permohonan pewarganegaraan atas nama Anisha Ahmed.		
16	Penerapan PMPJ dan Pengawasan Audit Kepatuhan Terhadap Notaris	Pengisian Form CDD oleh Pengguna Jasa, Penilaian Mitigasi Risiko oleh Notaris dan Penilaian Notaris berisiko oleh LPP	Penerapan PMPJ dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML oleh Notaris	B01: Pembentukan SK Tim B02: Penyusunan jadwal Pelaksanaan Kegiatan Internalisasi SRA, Pengisian CDD, Mitigasi Risiko Pengguna Jasa & Penilaian Notaris berisiko oleh LPP (Ditjen AHU)	B01: SK TIM B02: Penyusunan jadwal Pelaksanaan Kegiatan Internalisasi SRA, Pengisian CDD, Mitigasi Risiko Pengguna Jasa & Penilaian Notaris berisiko oleh LPP (Ditjen AHU)	pelaksanaan PMPJ pada tarja B01 telah dilaksanakan, dengan pembentukan tim PMPJ periode tahun 2023 yang tertuang didalam SK Tim PMPJ tahun 2023.	Nihil	Dari hasil koordinasi dan konsultasi ke Subdit Notariat bahwa Pelaksanaan PMPJ tahun 2023 akan dilaksanakan audit kepada para Notaris yang belum pernah

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
				B03: Internalisasi SRA, Pengisian CDD Mitigasi penilaian risiko pengguna jasa oleh Notaris & Penilaian Notaris berisiko oleh LPP (Ditjen AHU)	B03: Laporan kegiatan (lampiran: surat undangan, daftar hadir peserta, notula, tabel pemetaan (presentase jumlah Notaris dengan jumlah yang sudah mengisi kuesioner PMPJ Tahun 2022), dokumentasi foto)			mengisi kuisisioner dari PPATK. Untuk TOT akan dilaksanakan oleh Subdit Notariat sekitar bulan Februari 2023
17	Pembaharuan Data Notaris & Identifikasi Status Notaris	Sinkronisasi Data Notaris yang Akurat antara Database AHU, Kanwil & Pengwil.	Adanya Data Notaris yang Akurat	B01: Pembentukan Tim B02: Pemetaan jumlah Notaris sesuai data base B03: Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 25% dari jumlah Notaris di wilayah.	B01: SK Tim B02: Data Notaris di Wilayah B03: - Hasil pengecekan data : 25% dari jumlah Notaris di wilayah. - Tindaklanjut hasil pengecekan, bagi Notaris yang tidak aktif diusulkan pemblokiran akunnya. Bagi Notaris yang meninggal dunia & sudah pension dilakukan pengecekan dan pengusulan pemegang protokolnya. - Laporan (lampiran: surat koordinasi, daftar hadir, notula, dokumentasi foto & data Notaris)	Pembuatan SK Tim pembaharuan data notaris dan identifikasi status	Penyusunan tim pembaharuan data notaris dan identifikasi notaris tidak bisa dilakukan secara cepat dikarenakan proses verifikasi penentuan anggota tim.	Penyusunan dan penentuan anggota tim dilakukan secepat mungkin sehingga waktu pelaksanaan pembaharuan data dan identifikasi data notaris dapat segera dilaksanakan
18	Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Terkumpulnya data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Diperolehnya alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	B01-B02 : Persiapan dan koordinasi dengan instansi pusat terkait petunjuk teknis pelaksanaan pengumpulan data	B01-B03 : Laporan (Lampiran: undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi)	Membuat daftar inventaris masalah terkait pengumpulan data parpol.	Masih adanya data parpol yang tidak valid.	Berkoordinasi dengan Instansi pusat dan Instansi lain terkait pelaksanaan pengumpulan data parpol.

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
				B03 : Sosialisasi kepada partai politik tingkat provinsi terkait pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi				
19	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia	Terlaksananya pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah.	Data anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah.	B01-B03: Koordinasi persiapan tarja antara kanwil, instansi terkait, dan Ditjen AHU	B01-B03: Laporan koordinasi persiapan tarja (Lampiran: undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi)	Telah membuat SK Tim Kewarganegaraan, telah berkoordinasi dengan stakeholder (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Provinsi dan Kabupaten di wilayah D.I. Yogyakarta) terkait kerja sama melakukan pendataan anak berkewarganegaraan ganda yang mendapatkan fasilitas Pasal 3A PP No. 21/2022 dan diseminasi terkait prgram pemerintah tersebut mengingat hanya berlaku selama 2 tahun sampai tahun 2024.	Sampai akhir bulan Januari 2023 belum diperoleh data komprehensif mengenai anak berkewarganegaraan ganda yang mendapat fasilitas Pasal 3A PP No. 21/2022	Berkoordinasi dengan Dit. Tata Negara, Ditjen. AHU
20	Mendorong pertumbuhan permohonan merek One Village One Brand dan IG di wilayah melalui kerjasama Pemerintah Daerah/stakeholder terkait/MPIG dalam bentuk Mobile IP Clinic	inventarisasi potensi pendaftaran merek di desa-desa	Terlaksananya pendampingan pengembangan merek untuk produk dalam negeri, menyusun strategi pemasaran dan menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan dan pemanfaatan merek	B01 : Kanwil mengikuti koordinasi konsep dan sosialisasi pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis One Village One Brand B02: Koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder, terkait: 1. Pemetaan atau inventarisasi potensi One Village One Brand dan IG 2. Persiapan pelaksanaan Mobile IP 3. Clinic terkait sarana prasarana layanan HKI di wilayah B03: 1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di	B01 : laporan keikutsertaan koordinasi dan sosialisasi B02: laporan koordinasi potensi One Village One Brand atau laporan koordinasi rencana pelaksanaan Mobile IP Clinic B03: Laporan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis One Village One Brand dan Indikasi Geografis di wilayah yang diselenggarakan oleh DJKI pada tanggal 20 Januari 2023 dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan surat dari DJKI Nomor HKI-PW.01.02-05 tanggal 18 Januari 2023 tentang Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2023

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
				Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri				
21	Terlaksananya kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka mendukung tahun Hak Merek dan peningkatan KIK	Kantor Wilayah menjalin kolaborasi dan sinergi dalam rangka pelaksanaan layanan KI dan peningkatan permohonan KI melalui implementasi MoU/PKS Kanwil dengan stakeholder wilayah	Monitoring dan Evaluasi Implementasi MoU/PKS Kantor Wilayah dengan Stakeholder wilayah	B01 : - Inventarisasi dan Evaluasi MoU yang sudah dilakukan oleh Kanwil. - Tindak lanjut dan penyusunan MoU/PKS kanwil dengan stakeholder tahun 2023." "B02: - Kanwil mengikuti koordinasi Mobile IP Clinic yang dilaksanakan oleh DJKI - Kanwil menyusun rencana pelaksanaan Mobile IP Clinic dengan titik berat merek (dalam rangka tahun merek). - Kanwil Koordinasi dengan MIPG untuk penyempurnaan Dokumen Deskripsi permohonan Indikasi Geografis yang sudah diajukan sebelumnya." B03: Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemda Provinsi/Kota/Kab/instansi terkait layanan KI melalui 2 mekanisme : 1. IP Clinic (mall pelayanan publik, layanan sentra KI, dll) - bagi wilayah yang telah memiliki layanan KI/IP Clinic di MPP 2. Mobile IP Clinic - bagi wilayah yang belum memiliki layanan KI di MPP.	B01 : Laporan Evaluasi 2022 "B02: Laporan pelaksanaan kegiatan."	Tersusunnya laporan evaluasi implementasi MoU/PKS antara Kantor Wilayah dengan 14 Perguruan Tinggi dan stakeholder pada tahun 2022	Tidak diberikannya format penyusunan sebagai pedoman strategi	Melakukan koordinasi dengan bagian pelaporan DJKI
22	Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024 Dengan Aksi Inventarisasi Komunitas Seni, Pekerja Seni,	Kantor Wilayah bersama dengan stakeholder Melaksanakan mengusulkan inventarisasi kandidat Kawasan Karya Cipta	Kandidat Kawasan Karya Cipta sesuai dengan kriteria	B01 : - B02: Mengikuti koordiasi persiapan Pemetaan Calon kawasan karya cipta dari DJKI	B01 : - B02: Laporan mengikuti kegiatan dan dokumentasi	-	-	-

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
	Konten Kreator, Penulis Buku	sesuai dengan pedoman yang diberikan		B03 : 1. Koordinasi dengan stakeholder 2. Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI	B03: Laporan hasil koordinasi dan usulan kandidat KKC			
23	Menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang mampu melakukan penelusuran dan pemanfaatan informasi paten	Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang mampu melakukan penelusuran dan pemanfaatan informasi paten	B01: Memetakan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang B02: - B03: -	B01: Daftar Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang B02: - B03: -	Tersusunnya daftar Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang guna pemanfaatan informasi paten	Tidak terpublikasinya dokumen yang dibutuhkan pada website Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	Melakukan koordinasi melalui call center/helpdesk masing-masing Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang
24	Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi Pusat belanja berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional	Mewujudkan penegakan hukum perlindungan HKI, melalui edukasi dan membangun budaya anti barang tiruan dan bajakan (pencegahan pelanggaran KI)	Terlaksananya sertifikasi pusat belanja dan monev sertifikasi pusat belanja berbasis KI	B0: - B02: - B03: Pelaksanaan koordinasi dengan Direktorat Penyidikan atas rencana tindak lanjut sertifikasi pusat belanja tahun 2022 serta tahapan rencana kerja di tahun 2023 dengan ruang lingkup Kab/ Kota dan pusat belanja tradisional	B01: - B02: - B03: Laporan mengikuti kegiatan dan dokumentasi	-	-	-
25	Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota melaksanakan Program Aksi HAM	45 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	B01: Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait B02: Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM 2022 Provinsi, Kabupaten/Kota Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait B03: Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait	B01: Dokumentasi dan notula Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM Daerah B02: Laporan Evaluasi pelaksanaan capaian Aksi HAM 2022 B03: Dokumentasi dan notula Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM Daerah	Terselesainya laporan capaian Aksi HAM Tahun 2022 yang merupakan akumulasi pelaporan B04, B08 dan B12 yang juga dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia. - Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah dan Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam melakukan pengunggahan data dukung pelaksanaan Aksi HAM di Daerah, sehingga membutuhkan kehati-hatian, ketelitian dan kesabaran dalam mengunggah data dukung melalui aplikasi serambiksp. - Banyak OPD yang belum memahami dan mempunyai persepsi bersama	Pada saat mengunggah data dukung harus ditunggu sampai selesai prosesnya, kemudian baru dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Apabila belum sudah terlanjur diklik maka data dukung tidak dapat tersimpan. - Melakukan koordinasi dengan OPD terkait Aksi HAM

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
							tentang RANHAM/Aksi HAM. Adanya mutasi pegawai di OPD yang belum pernah menangani aksi HAM atau RANHAM	
26	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Instansi Pemerintah mendapatkan kriteria Kab/Kota Peduli HAM	25% instansi pemerintah yang mendapatkan kriteria Daerah Kab/Kota Peduli HAM	B01 : Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah Daerah	B01 : Surat Notifikasi pelaksanaan Permenkumham No. 22 tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah daerah	Terselesainya penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022. Semua Kab/Kota di DIY mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM. - Terlaksananya kegiatan Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM	Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam melakukan pengumpulan dan pelaporan data penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM di Daerah. Setiap OPD melakukan mutasi pegawai tanpa adanya kaderisasi tentang Kab./Kota Peduli HAM. - Setiap OPD melakukan mutasi pegawai tanpa adanya kaderisasi tentang Kab./kota Peduli HAM. Kurangnya kompetensi SDM yang menangani Kab/Kota di OPD terkait	Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Provinsi, Kab/Kota terkait Penilaian Kab/Kota Peduli HAM. Membangun komunikasi yang intensif dan terbuka dengan OPD supaya data dukung Kab/Kota Peduli HAM - Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Provinsi, Kab./Kota
				B02 : Rapat persiapan penginputan laporan KKP HAM	B02 : Dokumentasi dan notulensi			
				B03: Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah Daerah	B03 : Dokumen Formulir Pengisian Pelaporan KKP HAM			
27	Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM	Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50% Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	B01 : Evaluasi dugaan pelanggaran /permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	B01 : Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran /permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh Instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	Terselesainya 12 kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Kanwil Kemenkumham.	Banyaknya kasus dugaan permasalahan HAM yang belum dilaporkan. Anggaran untuk melakukan sosialisasi, koordinasi, dan klarifikasi di lapangan tidak mencukupi.	Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan klarifikasi dengan instansi terkait. Melaksanakan rapat Persiapan dan Pelaksanaan Fasilitasi dugaan Pelanggaran HAM di wilayah dengan peserta Tim Yankomas dan pihak terkait.
				B02-B03 :	B02-B03 :			

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
				Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	pengaduan/konsultasi dugaan permasalahan HAM dari masyarakat sekitar - Terselenggaranya Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada Lapas Sleman atas pengaduan utang piutang antara Bapak Murjita dan Ibu Susi	dugaan permasalahan HAM yang belum dilaporkan. Anggaran untuk melakukan sosialisasi, koordinasi, dan klarifikasi di lapangan tidak mencukupi. - Instansi/pihak terkait belum sepenuhnya memahami tentang HAM. Kurangnya SDM yang menangani pengaduan yankomas di Kanwil. Anggaran untuk melakukan sosialisasi, koordinasi, dan klarifikasi di lapangan tidak mencukupi	sosialisasi, koordinasi dan klarifikasi dengan instansi terkait. Melaksanakan rapat Persiapan dan Pelaksanaan Fasilitasi dugaan Pelanggaran HAM di wilayah dengan peserta Tim Yankomas dan pihak terkait. - Sosialisasi, Koordinasi dan klarifikasi dengan instansi terkait.

TARGET KINERJA B01, B02, DAN B03 DIVISI PEMASYARAKATAN TAHUN 2023

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
DIVISI PEMASYARAKATAN								
28	Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Masyarakat Di Bidang Pelayanan Tahanan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan dibidang Pelayanan Tahanan	Menurunnya angka Overstaying Tahanan di Lapas dan Rutan	B.01 Membuat SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan overstaying tahanan di Ypt Lapas/Rutan Wilayah	B01 SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan overstaying tahanan di Ypt Lapas/Rutan Wilayah	Telah dibuat SK Tim Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan overstaying tahanan di UPT Lapas/Rutan Wilayah Dengan NOMOR : W14-252-PK.01.01 TAHUN 2023	-	Terus melaksanakan monitoring pada UPT Lapas/Rutan/LPKA dalam pelaksanaan Tarja B01
				B02 Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan	B02 Laporan Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan	<ul style="list-style-type: none"> Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan terlaksana dengan baik; Tidak ada tahanan yang mengalami Overstaying di seluruh UPT PAS DIY. 	-	Terus melaksanakan koordinasi dengan APH terkait
				B03 Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	B03 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan terlaksana dengan baik; Tidak ada tahanan yang bebas demi hukum pada UPT PAS DIY. 	-	Terus melaksanakan koordinasi dengan APH terkait
29	Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pemenuhan Hak Tahanan di Lapas dan Rutan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan dibidang Pelayanan Hukum dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan	Terselenggara Pelayanan Hukum dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan	B01 Pembentukan Tim pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan	B01 SK Tim	Seluruh UPT PAS telah membuat SK Tim pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan	-	Terus melaksanakan monitoring pada UPT Lapas/Rutan/LPKA dalam pelaksanaan Tarja B01
				B02 Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan	B02 Laporan Tahanan yang Mendapatkan	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan 	Masih adanya kebijakan isolasi tahanan baru untuk pencegahan penularan	Mengoptimalkan peran assesor pada masing masing UPT terkait assesment tahanan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
				bimbingan keterampilan dan kepribadian	Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	keterampilan dan kepribadian terlaksana dengan baik; <ul style="list-style-type: none"> Seluruh tahanan telah mendapatkan fasilitasi pelayanan hukum dan 98,9% tahanan telah mengikuti bimbingan keterampilan dan kepribadian. 	penyebaran Covid-19	
				B03 Memfasilitasi perjanjian kerjasama antara Pihak ketiga yang terakreditasi maupun terverifikasi dengan Unit Pelaksana Teknis Rutan/Lapas dalam pelaksanaan Pelayanan tahanan	B03 Perjanjian Kerjasama / MOU	Seluruh UPT telah memiliki Perjanjian Kerjasama dengan OBH/lembaga pelatihan/Fasyankes.	-	Memonitoring UPT Lapas/Rutan/LPKA dalam perencanaan sampai pelaksanaan perjanjian Kerjasama/MOU.
30	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang pengelolaan basan baran	Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang sesuai standar	Penggunaan SDP dalam Tatakelola administrasi basan baran yang optimal	B01-B03 : Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B01-B03 : Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran oleh Bapak Akbar Amnur selaku Kasubdit Adminitrasi dan PengelolaanBasan Baran secara Zoom Meeting pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 13.00-15.00 WIB diikuti Rupbasan se DIY terlaksana dengan baik.	-	Memonitoring UPT Rupbasan se DIY dalam keikutsertaan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran.
31	Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pemasyarakatan	Layanan rehabilitasi sesuai standar rehabilitasi pemasyarakatan.	Terselenggaranya layanan rehabilitasi bagi tahanan, narapidana,dan klien sesuai standar rehabilitasi pemasyarakatan	B01: Penyampaian SK Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Penetapan UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Tahun 2023	B01: Laporan penyampaian SK Direktur ke wilayah.	Telah disampaikan SK Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Penetapan UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Tahun 2023 dengan nomor: W14.UM.01.01– 234.	-	Terus melaksanakan monitoring pada UPT pelakasana layanan Rehabilitasu dalam pelaksanaan Tarja B01
				B02: Koordinasi Kesiapan UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Tahun 2023	B02: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi	Telah dilaksanakan Koordinasi kegiatan rehabilitasi dengan pihak-pihak terkait : BNNP DIY, BNNK Sleman, IKAI Cabang DIY, RS Puri Nirmala, RS Pantii Nugroho.	-	Memonitoring UPT Pas penyelenggaraan Rehabilitasi dalam pelaksanaan koordinasi Kesiapan UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
								Pemasyarakatan Tahun 2023.
				B03: Perencanaan Pelaksanaan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan ke UPT Pemasyarakatan	B03: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Persiapan	Telah dilaksanakan mentoring ke UPT PAS penyelenggara Rehabilitasi.	-	Mentoring pada UPT penyelenggara layanan Rehabilitasi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
32	Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan pemasyarakatan melalui pertukaran data SPPT TI	Terlaksananya SPPT TI pada UPT Lapas/Rutan/Bapas	Seluruh Lapas/Rutan/Bapas telah menerapkan SPPT TI	B01: 1. Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2023 2. Penetapan UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023	B01: 1. SK Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2023 2. SK UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023	Divisi Pemasyarakatan dan seluruh UPT PAS telah membuat SK Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2023	-	Terus melaksanakan monitoring pada UPT Lapas/Rutan/LPKA/Bapas dalam pelaksanaan Tarja B01
				B02-B03: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B02-B03: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Seluruh UPT Lapas/Rutan/LPKA telah melaksanakan mekanisme dan prosedur pertukaran data SPPT-TI secara konsisten	<ul style="list-style-type: none"> • APH terkait lainnya belum secara rutin memanfaatkan pertukaran data melalui SPPT-TI • Sebagian besar UPT belum memahami teknis penggunaan TTE Tersertifikasi pada dokumen SPHMP dan SL • Pengiriman data Litmas & Diversi pada SPPT-TI Bapas belum bisa dilakukan (pending) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong UPT Lapas/Rutan/LPKA dan Bapas untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan APH terkait lainnya dalam pemanfaatan data SPPT-TI • Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat TI dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
33	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting	B01: Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan	B01: SK Tim	Tidak membuat SK Tim Pelaksana Koordinasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan karena Wilayah Yogyakarta tidak termasuk dalam Surat	-	Berkoordinasi dengan Pusat terkait pelaksanaan tarja B01 pada wilayah yang tidak ditunjuk piloting penerapan Keadilan restoratif

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
						Keputusan Nomor: PAS-107.PK.04.04 tahun 2023 tentang Penetapan Kota Piloting Implementasi Alternatif Pemidanaan dan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Dewasa Tahun 2023. Namun membuat surat keterangan Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta pernah masuk dalam 10 Wilayah Piloting Implementasi Alternatif Pemidanaan Dan Restoratif Justice Bagi Pelaku Dewasa Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-476.PK.04.01 TAHUN 2022 Tentang Penetapan Kota Piloting Implementasi Alternatif Pemidanaan Dan Restoratif Justice Bagi Pelaku Dewasa Tahun 2022.		
				B02: Perencanaan Pelaksanaan Kordinasi tentang Implementasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan	B02: Laporan Perencanaan Pelaksanaan Koordinasi Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan	Seluruh UPT Bapas se DIY telah membuat table Perencanaan Pelaksanaan Kordinasi tentang Implementasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan.	-	Memonitoring UPT Bapas se DIY dalam perencanaan Pelaksanaan Kordinasi tentang Implementasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan.
				B03: Asistensi Online Persiapan Rapat Koordinasi Tentang Piloting Implementasi Keadilan Restoratif	B03: Laporan Pelaksanaan Asistensi Online Persiapan Rapat Koordinasi Tentang	UPT Bapas se DIY telah melaksanakan Asistensi Online Persiapan Rapat Koordinasi Tentang	-	Memonitoring asistensi online yang dilaksanakan Bapas se DIY pada Pusat dalam penyampaian Persiapan Rapat

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
					Piloting Implementasi Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa	Piloting Implementasi Keadilan Restoratif.		Koordinasi Tentang Piloting Implementasi Keadilan Restoratif
34	Peningkatan kualitas pelayanan pembinaan narapidana	1. Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikasi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama terkait Pembinaan Kemandirian sbb: a. Lapas yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M. HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, melaksanakan kemitraan dengan minimal 3 (tiga) mitra. b. Lapas di luar Kepmenkumham RI tersebut diatas, melaksanakan kemitraan dengan minimal 1 (satu) mitra.	B01: Koordinasi dengan Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian serta rencana kemitraan. Koordinasi dengan pihak ketiga yang diproyeksikan menjadi mitra lapas. B02: Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama antara mitra dengan Lapas terkait pembinaan kemandirian sbb: a. Lapas yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M. HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, melaksanakan kemitraan dengan minimal 3 (tiga) mitra. b. Lapas di luar Kepmenkumham RI tersebut diatas, melaksanakan kemitraan dengan minimal 1 (satu) mitra.	B01: Laporan koordinasi dengan Kanwil terkait pemetaan Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian serta rencana kemitraan B02: Laporan Rekapitulasi Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama antara mitra dengan Lapas	UPT Lapas se DIY telah membuat data rencana Kemitraan kegiatan kemandirian Diluar/Selain yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M. HH01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif. UPT Lapas se DIY telah melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan mitra terkait dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian; •Lapas Jogja : 2 Mitra; Lapas Narkotika Jogja : 6 Mitra; Lapas Perempuan Jogja : 3 Mitra;Lapas Sleman : 3 Mitra; Lapas Wonosari : 6 Miktra. •Seluruh UPT Lapas di Jogja tidak tercantum dalam dalam Kepmenkumham RI No. M. HH01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif namun telah membuat perjanjian Kerjasama lebih dari 1 (satu) mitra dan melebihi target yang ditetapkan.	-	<ul style="list-style-type: none"> Membuat surat edaran pada Lapas perihal permohonan data pemetaan terkait rencana kemitraan kegiatan kerja dan produksi; Memonitoring UPT Lapas dalam pelaksanaan rencana kemitraan kegiatan kerja dan produksi. Memonitoring pelaksanaan perjanjian Kerjasama antara Lapas se DIY dengan mitra terkait.
				B03:	B03: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan	Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang	-	Terus melaksanakan monitoring kegiatan pembinaan kemandirian

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
				Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	bekerja sama dengan mitra pada UPT Lapas se DIY berjalan dengan baik		yang bekerja sama dengan mitra pada UPT Lapas se DIY.
		2. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian.	Narapidana yang dinilai dan memperoleh nilai sangat baik dalam pembinaan kepribadian dengan instrumen SPPN sebanyak 70%.	B01: 1. Evaluasi pelaksanaan dan hasil penilaian pembinaan narapidana. 2. Tindak lanjut Surat Edaran tentang Target Kinerja Pelayanan Pembinaan narapidana tahun 2023	B01: 1. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan dan penilaian pembinaan narapidana. 2. Laporan hasil penilaian pada bulan Desember. 3. Laporan hasil tindak lanjut SE tentang Target Kinerja Pelayanan Pembinaan Narapidana tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh UPT Lapas/Rutan/LPKA telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan penilaian pembinaan narapidana dari hasil tersebut UPT Lapas/Rutan/LPKA se DIY telah melebihi target dalam pelaksanaan penilaian pembinaan Narapidana (SPPN); Persentase Narapidana Yang Memperoleh Predikat BAIK (Skor Sangat Baik dan Baik) Variable Pembinaan Kepribadian pada Lapas/Rutan/LPKA : 97,27%; UPT Lapas/Rutan/LPKA telah menindaklanjuti SE tentang Target Kinerja Pelayanan Pembinaan Narapidana tahun 2023 dan membuat laporan pelaksanaan 	-	<ul style="list-style-type: none"> Memonitoring dari hasil evaluasi Lapas/Rutan/LPKA se DIY dalam pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (SPPN); Menyampaikan surat edaran perihal pemenuhan Tarja Kemenkumham 2023 Bidang Pembinaan Kepribadian Narapidana; Memonitoring hasil penilaian pembinaan narapidana (SPPN) pada UPT Lapas/Rutan/LPKA;
				B02: 1. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Januari. 2. Sosialisasi SE tentang tindak lanjut target kinerja tahun 2023.	B02: 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Januari. 2. Laporan hasil Sosialisasi SE tentang tindak lanjut target kinerja tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Narapidana Yang Memperoleh Predikat BAIK (Skor Sangat Baik dan Baik) Variable Pembinaan Kepribadian pada Lapas/Rutan/LPKA : 99,59%; Sosialisasi SE tentang tindak lanjut target kinerja tahun 2023 pada UPT Lapas/Rutan/LPKA berjalan dengan baik. 	-	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kepada WBP untuk aktif berkoordinasi dengan wali yang ditunjuknya; Memonitoring hasil penilaian pembinaan narapidana (SPPN) pada UPT Lapas/Rutan/LPKA;

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
				<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 55% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 55% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 55% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 55% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Februari. 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Februari. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Februari. (65% narapidana memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian) 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Narapidana Yang Memperoleh Predikat BAIK (Skor Sangat Baik dan Baik) Variable Pembinaan Kepribadian pada Lapas/Rutan/LPKA : 95,68%; hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Februari. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian) di UPT Lapas/Rutan/LPKA melebihi target. 	-	Memonitoring hasil penilaian pembinaan narapidana (SPPN) pada UPT Lapas/Rutan/LPKA;
35	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang bersumber dari dalam maupun dari luar dengan melakukan deteksi dini	Melakukan langkahlangkah deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada 327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA	<p>B01</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan internalisasi target kinerja pusat ke seluruh UPT Pembentukan UIP pada setiap UPT Jumlah Petugas yang belum dan yang sudah mendapatkan pelatihan di UPT Monev pemetaan tingkat kerawanan gangguan kamtib Sosialisasi konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan 	<p>B01</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi target kinerja SK UIP dari Unit Pelaksana Teknis di Indonesia Rekap dari kanwil nama, nip, jabatan, nomor HP petugas yang belum pernah mendapatkan pelatihan dari UPT laporan pemetaan tingkat kerawanan gangtib berdasarkan hasil identifikasiinstrumen deteksi dini Laporan pelaksanaan sosialisasi konsolidasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi target kinerja pada UPT Pas Se DIY pada tanggal 06 Januari 2023 terlaksana dengan baik; Divisi Pas dan UPT Pas se DIY telah membuat SK UIP; Rekap petugas UPT Pas se DIY yang belum pernah mendapatkan pelatihan UIP dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan; UPT Pas se DIY telah membuat laporan pemetaan tingkat kerawanan gangtib berdasarkan hasil identifikasi instrumen deteksi dini; Pelaksanaan sosialisasi konsolidasi terkait 	-	<ul style="list-style-type: none"> Terus melaksanakan monitoring pada UPT pas se DIY dalam pemenuhan data dukung Tarja B01; Membuat surat edaran dalam permintaan data dukung Tarja.

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
						<p>intelijen pada Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan baik.</p>		
				<p>B02</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan UIP pada setiap UPT 2. Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasyarakatan 	<p>B02</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK UIP dari Unit Pelaksana Teknis di Indonesia 2. Dokumen Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap UPT 3. Laporan hasil konsolidasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Divisi Pas dan UPT Pas se DIY telah membuat SK UIP; • Dokumen profiling UPT Pas se DIY telah lengkap; • Pelaksanaan sosialisasi konsolidasi terkait intelijen pada Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan baik. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Terus melaksanakan monitoring pada UPT pas se DIY dalam pemenuhan data dukung Tarja B01; • Membuat surat edaran dalam permintaan data dukung Tarja.
				<p>B03</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Barat 3. Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 4. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasyarakatan 	<p>B03</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi anggota UIP 3. Laporan kegiatan intelijen 4. Laporan hasil konsolidasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen pada UPT Pas se DIY berjalan dengan baik; • Telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi anggota UIP pada tanggal 14 Maret 2023; • Seluru UPT Pas se DIY telah melaksanakan kegiatan Intelejen dan membuat laporan kegiatan; • Pelaksanaan sosialisasi konsolidasi terkait 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Terus melaksanakan monitoring pada UPT pas se DIY dalam pemenuhan data dukung Tarja B01; • Membuat surat edaran dalam permintaan data dukung Tarja.

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
						intelijen pada Divisi Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan telah dilaksanakan dengan baik.		
36	Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	Terpenuhinya Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan yang valid dan lengkap	Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B01 Melakukan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024	B01 Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024	Pelaksanaan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024 pada Lapas, Rutan dan LPKA di Wilayah D.I. Yogyakarta telah berjalan dengan baik	belum bisa melaksanakan sinkronisasi NIK karena fitur Sinkronisasi NIK pada Aplikasi SDP belum diupdate	melakukan input data secara manual sesuai petunjuk dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada Aplikasi SDP
				B02-B03: Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B02-B03: Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	Pelaksanaan Implementasi surat Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS.7-TI.06.04-271 tanggal 17 Februari 2023 perihal Penyampaian Laporan <i>Progress</i> Sinkronisasi NIK pada Lapas, Rutan dan LPKA di Wilayah D.I. Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan dikirim tiap minggu sekali	Masih terdapat 18 orang belum memiliki NIK dan 31 orang yang belum ada KTP Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> koordinasi dengan Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi D.I. Yogyakarta, guna pemutakhiran serta Validasi data NIK narapidana dan tahanan; koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota, guna pemutakhiran serta Validasi data NIK narapidana dan tahanan
						Pelaksanaan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024 pada Lapas, Rutan dan LPKA di Wilayah D.I. Yogyakarta telah berjalan dengan baik	Masih terdapat 6 orang belum memiliki NIK dan 7 orang yang belum ada KTP Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> koordinasi dengan Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi D.I. Yogyakarta, guna pemutakhiran serta Validasi data NIK narapidana dan tahanan;

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
								<ul style="list-style-type: none">koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota, guna pemutakhiran serta Validasi data NIK narapidana dan tahanan

TARGET KINERJA B01, B02, DAN B03 DIVISI KEIMIGRASIAN TAHUN 2023

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
DIVISI KEIMIGRASIAN								
37	Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman	Diimplementasikannya layanan Paspor Online terbaru pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal Pelayanan Publik)	Masyarakat dapat mengakses dan menggunakan Paspor Online secara berkelompok dalam melakukan permohonan paspor pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal Pelayanan Publik) Catatan: Data secara kelompok harus dibatasi sebagaimana Eazy paspor dan paspor simpati	B03 1. Melaksanakan Sosialisasi dan uji coba Paspor Online kepada masyarakat/lembaga/instansi terkait oleh setiap satuan kerja 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan melampirkan dokumentasi	B03 1. Kompilasi laporan uji coba dan data pelaksanaan sosialisasi paspor online oleh Divisi Keimigrasian 2. Laporan sosialisasi Paspor Online (per Satuan Kerja) beserta Dokumentasi 3. Uji coba kesisteman	B03 1. Laporan pelaksanaan ujicoba dan data pelaksanaan sosialisasi paspor online oleh Divisi Keimigrasian dengan capaian Sosialisasi dan ujicoba sebanyak 14 Kali kegiatan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah/instansi swasta di wilayah Yogyakarta 2. Tersajikannya laporan kegiatan sosialisasi yang diikuti Satuan Kerja dan juga Divisi Keimigrasian 3. Telah dilaksanakan uji coba kesisteman terkait dengan layanan paspor online melalui Aplikasi Mobile Paspor	-	Telah disusun rencana kerja dan kalender kerja terkait dengan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan tugas teknis terkait dengan penerapan paspor online pada satuan kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan target kinerja
38	Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan <i>Final Rejected</i> di Wilayah Indonesia	Terselenggaranya Klasifikasi Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)	Adanya informasi dan data tentang Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)	B03 1. Pembentukan tim klasifikasi SDM 2. Pembentukan Tim pelatih teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>) 3. Pelatihan Teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)	B03 1. SK Tim 2. Data SDM yang terklasifikasi untuk dilatih 3. Laporan pelaksanaan pelatihan teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)	B03 1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2023 telah membentuk tim klasifikasi SDM sesuai dengan surat keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta nomor : W.14.IMI.IMI.1-1568-KP.04.01 Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023 2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2023 telah menyusun Data SDM yang terklasifikasi untuk	NIHIL	Berkoordinasi dengan Rudenim dan instansi, terkait pendataan pengungsi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
						<p>dilatih sesuai dengan SK tim klasifikasi SDM surat keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta nomor : W.14.IMI.IMI.1-1568-KP.04.01 Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023</p> <p>3. Divisi Keimigrasian pada tanggal 27 Januari 2023 Telah membentuk Tim pelatih teknis pendataan pengungsi luar negeri sesuai dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY nomor : W14-GR.03.06-1355 tahun 2023, untuk memberikan pelatihan pendataan pengungsi</p> <p>4. Divisi keimigrasian dan Tim Klasifikasi SDM telah mengikuti Pelatihan Teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected) telah dilaksanakan secara online yang telah diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada Rabu – Jumat / 08 s.d 10 Maret 2023</p>		
39	Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya	Terpatuhinya regulasi penjaminan orang asing oleh penjamin dan orang asing	Terselenggaranya data penjamin virtual bagi orang asing dan kegiatannya yang memerlukan keberadaan orang asing	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pendataan penjamin orang asing 2. Rapat dengan K/L terkait yang mempunyai tugas fungsi terkait dengan perusahaan /organisasi 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim 2. Laporan kegiatan hasil rapat pembahasan 	<p>B03</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi keimigrasian pada tanggal 27 Januari 2023 telah membentuk Tim pendataan penjamin orang asing sesuai dengan surat keputusan Kepala 	NIHIL	Menyiapkan data penjamin orang asing yang akan dilakukan pendataan pada Triwulan II

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	KENDALA	STRATEGI
						<p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY nomor : W14-GR.03.06-1353 tahun 2023 ;</p> <p>2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2023 telah membentuk tim pendataan penjamin orang asing sesuai dengan surat keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta nomor : W.14.IMI.IMI.1-1567-KP.04.01 Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023</p> <p>3. Rapat dengan K/L terkait yang mempunyai tugas fungsi terkait dengan perusahaan / organisasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023 sesuai dengan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : W14.GR.04.02-2557, Tanggal 21 Februari 2023. Rapat koordinasi dengan Dinas tenaga Kerja Provinsi DIY</p>		

D. Simpulan dan Saran

•Simpulan

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta telah melaksanakan upload data dukung target kinerja B01 s.d. B03 setiap bulan melalui aplikasi Monitoring Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada laman <http://kinerja.kemenkumham.go.id/>. yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada 6 s.d. 15 April 2023.
- Kantor Wilayah telah menyusun Laporan Evaluasi Mandiri Atas Capaian Target Kinerja Triwulan I Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023 memuat :
 - a. Capaian pelaksanaan target kinerja
 - b. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan
 - c. Strategi yang digunakan dalam pencapaian target kinerja

•Saran

- Setiap divisi perlu menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi Mandiri Atas Capaian Target Kinerja Triwulan agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada periode selanjutnya.

E. Penutup

Laporan ini dibuat sebagai bahan Evaluasi Mandiri Atas Capaian Target Kinerja Triwulan I Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023 serta untuk strategi pencapaian target kinerja periode selanjutnya.



Yogyakarta, 4 April 2023
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001